



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2020**

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEBUMEN**
KEBUMEN, 31 JANUARI 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.2. Permasalahan utama yang dihadapi.....	3
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	5
2.1. Perencanaan Strategis.....	5
2.1.1. Rencana Strategis (Renstra).....	5
2.1.2. Indikator Kinerja Utama	5
2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	6
2.2. Perjanjian Kinerja	6
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	9
3.2. Realisasi Anggaran	28
BAB IV : PENUTUP.....	30
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	30
4.2. Permasalahan/kendala	31
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja	36
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
2. Anggaran dan Realisasi Belanja	
3. Prestasi yang telah dicapai	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Target indikator kinerja sasaran strategis tahun 2020.....	6
Tabel 2.2	: Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	7
Tabel 3.1	: Skala ordinal dan kategori capaian.....	9
Tabel 3.2	: Capaian prosentase berkurangnya luasan kumuh tahun 2020	10
Tabel 3.3	: Data lokasi kawasan kumuh dan penanganan s.d tahun 2020.....	11
Tabel 3.4	: IKLH Kabupaten Kebumen Tahun 2020.....	13
Tabel 3.5	: Capaian IKLH Tahun 2020 dengan tiga variabel..	14
Tabel 3.6	: Capaian luas RTH perkotaan tahun 2020.....	17
Tabel 3.7	: Data luas RTH Perkotaan sampai dengan tahun 2020.....	18
Tabel 3.8	: Indeks Kualitas Udara tahun 2020.....	20
Tabel 3.9	: Capaian indeks kualitas air tahun 2020.....	22
Tabel 3.10	: Capaian cakupan pelayanan sampah tahun 2020.....	24
Tabel 3.11	: Perhitungan cakupan pelayanan sampah tahun 2020.....	24
Tabel 3.12	: Capaian cakupan rumah layak huni tahun 2020	26
Tabel 3.13	: Alokasi anggaran penanganan RTLH Tahun 2019	27
Tabel 3.14	: Realisasi anggaran belanja tahun anggaran 2020.....	28

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	: Capaian prosentase berkurangnya luasan kumuh tahun 2016-2020.....	10
Grafik 3.2	: Capaian IKLH Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020.....	14
Grafik 3.3	: Perbandingan capaian IKLH dengan provinsi dan nasional.....	14
Grafik 3.4	: Capaian luas RTH perkotaan Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020.....	17
Grafik 3.5	: Capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020.....	20
Grafik 3.6	: Perbandingan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen dengan provinsi dan nasional.....	21
Grafik 3.7	: Capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020.....	22
Grafik 3.8	: Capaian IKA Kabupaten Kebumen dibandingkan provinsi dan nasional.....	23
Grafik 3.9	: Capaian cakupan pelayanan sampah tahun 2016-2020.....	24
Grafik 3.10	: Capaian Cakupan Rumah Layak Huni tahun 2016-2020.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2016 dengan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, serta sub urusan persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penyusunan rencana dan program di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta kehutanan;
- perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta kehutanan;
- pelaksanaan koordinasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta kehutanan;

- pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta kehutanan;
- pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan serta kehutanan;
- pelaksanaan administrasi Dinas;
- pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen meliputi :

- Kepala Dinas;
- Sekretariat, terdiri dari :
 - Subbagian Perencanaan;
 - Subbagian Keuangan; dan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
 - Seksi Perumahan; dan
 - Seksi Kawasan Permukiman.
- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri atas:
 - Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
 - Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pelestarian Lingkungan.
- Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - Seksi Penataan dan Pengkajian Dampak Lingkungan; dan
 - Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
- Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri atas:

- Seksi Kebersihan; dan
- Seksi Pertamanan.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri atas :
 - UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah Wilayah Timur
 - UPTD Pengelola Air Limbah dan Sampah Wilayah Barat
 - UPTD Laboratorium Lingkungan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2. Permasalahan utama yang dihadapi.

Permasalahan utama yang dihadapi mencakup urusan perumahan dan kawasan permukiman dan urusan lingkungan hidup, sebagai berikut :

1.2.1. Urusan perumahan dan kawasan permukiman.

- Pada kawasan perumahan dan permukiman masih banyak rumah dalam kondisi tidak layak huni terutama pada rumah tangga dengan berpenghasilan rendah atau miskin.
- Masih terdapat kawasan permukiman kumuh yang memerlukan penanganan mencakup kewenangan kabupaten, provinsi maupun pusat.

1.2.2. Urusan Lingkungan Hidup.

- Belum optimalnya pengelolaan persampahan disebabkan oleh berbagai factor, terbatasnya infrastruktur persampahan (kapasitas TPA dan armada pengangkutan) menjadi salah satu aspek berpengaruh dalam pengelolaan persampahan. Selain itu kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam upaya pengurangan dan pengolahan sampah menjadi hal yang paling berimbas pada upaya-upaya pengurangan sampah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi sampah yang terus meningkat setiap tahunnya.
- Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.

- Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.
- Masih terjadi pencemaran lingkungan hidup dapat dilihat dari indeks kualitas air dan indeks kualitas udara. Kualitas air permukaan yang menurun meski masih berada di jangkauan target berkaitan juga dengan kondisi lahan kritis yang belum tertangani. Banyak terdapat industri kecil yang belum memiliki IPAL sehingga limbahnya langsung dibuang ke tanah atau mengalir ke sungai menyebabkan pencemaran, termasuk juga limbah domestik rumah tangga. Kualitas udara berkaitan pula dengan polusi udara yang disebabkan salah satunya oleh terus bertambahnya jumlah kendaraan. Daya dukung Lingkungan yang semakin menurun, sangat membutuhkan perbaikan lingkungan/hutan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis.

2.1.1. Rencana Strategis.

Rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, dengan visi “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”, sedangkan misi yang terkait dengan tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yaitu pada Misi ke-3 dan Misi ke-4.

Misi ke-3; Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;

Misi ke-4; Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;

2.1.2. Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen meliputi :

- Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan.
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKU Daerah).
- Indeks Kualitas Udara.
- Indeks Kualitas Air.
- Capaian luas RTH perkotaan.

- Cakupan Pelayanan Sampah, dan
- Cakupan Rumah Layak Huni.

2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

Target indikator kinerja sasaran Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen sebagai berikut “

Tabel 2.1
Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Meningkatnya pelayanan infrastruktur	Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan	83,33
Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Indeks kualitas lingkungan hidup	76
		Capaian luas RTH perkotaan	17,45
		Angka indeks kualitas udara	78
		Angka indeks kualitas air	74
		Cakupan pelayanan sampah	42,94
Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Cakupan rumah layak huni	100

2.2. Perjanjian Kinerja.

Penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2020 mengacu Rencana Strategis Tahun 2016-2020 dan Rencana Kinerja Tahunan 2020.

Tabel : 2.2
Perjanjian Kinerja tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja
1.	Meningkatnya pelayanan infrastruktur	Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan	83,33
2.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76
		Capaian luas RTH perkotaan	17,45
		Indeks Kualitas Udara	78
		Indeks Kualitas Air	74
		Cakupan pelayanan sampah	42,94
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Cakupan rumah layak huni	100
No.	Program	Pagu (Rp)	Keterangan
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.513.944.000	APBD Kab
II.	BELANJA LANGSUNG	10.914.223.000	
1	Program Pengembangan Perumahan	736.934.000	APBD Kab
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	641.337.000	APBD Kab
3	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	1.895.142.000	APBD Kab
4	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1.788.758.000	APBD Kab
5	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	126.279.000	APBD Kab
6	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	770.171.000	APBD Kab
7	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	196.047.000	APBD Kab
8	Program peningkatan pengendalian polusi	431.454.000	APBD Kab
9	Program pengelolaan areal pemakaman	322.875.000	APBD Kab

10	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	2.084.663.000	APBD Kab
11	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	181.286.000	APBD Kab
12	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.376.530.000	APBD Kab
13	Program peningkatan sarana dan praasarana aparatur	300.237.000	APBD Kab
14	Program pengembangan data/informasi	62.510.000	APBD Kab
	TOTAL	20.428.167.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi.

Capaian kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang tidak terlepas dari mekanisme fungsi perencanaan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka harus dilakukan evaluasi dan pengukuran.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan Skala pengukuran ordinal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Skala ordinal dan kategori capaian

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% sd. 100%	Baik (B)
3	55 % sd. 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan tahun 2020, mencakup tiga sasaran strategis yaitu (1) meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah, (2) meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam, dan (3) meningkattnya keberdayaan masyarakat. Secara rinci capaian kinerja tahun 2020 untuk masing-masing sasaran sebagai berikut :

- 3.1.1. Sasaran 1, “Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah”, dengan indikator “prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan”.

Penanganan kawasan kumuh mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 7 indikator yaitu penataan bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, jaringan air limbah, pengelolaan persampahan, penyediaan air minum dan proteksi kebakaran. Luasan permukiman kumuh di Kabupaten Kebumen ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 663/563/KEP/2014 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kebumen seluas 213,622 Ha, meliputi 5 wilayah kecamatan yaitu Kec. Gombang (2 kelurahan), Kec. Karanganyar (2 kelurahan dan 1 desa), Kec. Kebumen (5 kelurahan dan 3 desa), Kec. Kutowinangun (4 desa), Kec. Prembun (4 desa).

Formulasi penghitungan capaian kinerja sebagai berikut : (Areal Kawasan Kumuh Perkotaan - Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan)/Areal Kawasan Kumuh Perkotaan x 100%

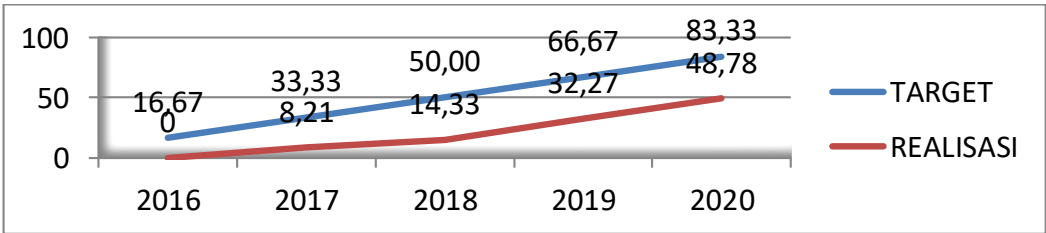
Sampai dengan akhir tahun 2020, dari kawasan kumuh seluas 213,622 Ha, sudah tertangani seluas 104,204 Ha (48,78%), sebagaimana tabel berikut :

Tabel : 3.2
Capaian prosentase berkurangnya luasan kumuh tahun 2020

No.	Indikator kinerja	Satuan	capaian sd 2019	2020			Target akhir RPJ-MD
				Tar-get	Realisasi	% Capaian	
1	Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan	%	32,27	83,33	48,78	58,54%	100

Sedangkan perbandingan capaian tahun 2020 dengan tahun sebelumnya, sebagaimana grafik berikut :

Grafik : 3.1
Capaian prosentase berkurangnya luasan kumuh tahun 2016-2020



Capaian kinerja penanganan kawasan kumuh belum sesuai dengan target, antara lain disebabkan bahwa target yang ditetapkan seluas 213,622 ha mencakup kewenangan kabupaten 53,556 ha, kewenangan provinsi 47,807 ha dan kewenangan pusat 112,259 ha, sehingga penanganan yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya. Sampai saat ini alokasi anggaran untuk penanganan dari pemerintah provinsi maupun pusat belum sesuai dengan yang ditargetkan, sedangkan untuk tahun anggaran 2020 alokasi anggaran APBD Kabupaten dialihkan untuk penanganan Covid-19. Upaya yang telah ditempuh antara lain dengan melakukan koordinasi dan mengusulkan alokasi anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat (program kotak/ APBN dan DAK Bidang Sanitasi).

Data lokasi kawasan kumuh dan penanganannya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Data lokasi kawasan kumuh dan penanganan sd tahun 2020

NO .	KEWENANG AN	LUAS (Ha)	Penang anan s.d 2019	Penang anan 2020	Total penanga nan	%	SISA (Ha)
I.	KABUPATEN	53,556	32,784	3,080	35,864	66,97	20,772
1	Wonokriyo	2,197	2,197		2,197	100,00	
2	Plarangan	4,346	4,346		4,346	100,00	
3	Karanganyar	0,506	0,506		0,506	100,00	
4	Kawedusan	0,091	0,091		0,091	100,00	
5	Bumirejo	5,280	5,280		5,280	100,00	
6	Kutosari	5,421	4,791	0,630	5,421	100,00	0,630
7	Selang	5,295	5,295		5,295	100,00	-
8	Tamanwinan gun	0,964	0,964		0,964	100,00	
9	Kebumen	9,040	9,040		9,040	100,00	
10	Gemeksekti	0,274	0,274		0,274	100,00	
11	Kuwarisan	7,410					7,410
12	Lundong	6,343					6,343
13	Bagung	6,389		2,450	2,450	38,35	6,389
II.	PROVINSI	7,807	36,160	9,460	45,620	95,43	11,647
14	Gombong	14,516	14,516		14,516	100,00	-
15	Candi	10,647	10,647		10,647	100,00	-
16	Panjer	10,997	10,997		10,997	100,00	-
17	Mekarsari	11,647		9,460	9,460	81,22	11,647
III.	PUSAT	112,259		22,720	22,720	20,24	112,259
18	Kutowina- ngun	26,324		20,420	20,420	77,57	26,324

NO .	KEWENANG AN	LUAS (Ha)	Penangan an s.d 2019	Penangan an 2020	Total penangan an	%	SISA (Ha)
19	Tersobo	24,467			-	-	24,467
20	Prembun	32,706		2,300	2,300	7,03	32,706
21	Kabekelan	28,762			-	-	28,762
	JUMLAH	213,622	68,944	35,260	104,204	48,78	144,678

Program yang menunjang untuk penanganan kawasan kumuh tahun 2020 yaitu Program Lingkungan Sehat Perumahan pada Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan/APBN bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen terdiri dari :

- Belanja langsung Rp. 641.337.000,- Realisasi Rp.623.128.264,- (97,16%).
- Belanja tindak langsung/Bansos Rp. 1.650.000.000,- realisasi Rp.1.650.000.000,- (100%).

Sedangkan anggaran penanganan kawasan kumuh yang bersumber dari pusat DAK Bidang Sanitaasi dengan anggaran sebesar Rp. 3.250.000.000,- realisasi Rp. 3.250.000.000,- (100%).

Untuk mencapai target pada tahun berikutnya, upaya yang dilakukan dengan merencanakan program/kegiatan dan melakukan koordinasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendapatkan alokasi anggaran penanganan kawasan kumuh sesuai dengan pembagian kewenangannya.

3.1.2. Sasaran 2, “Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam”

Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/IKLH (IKU Daerah).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah :

- Sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Indikator yang digunakan dalam penghitungan IKLH Kabupaten Kebumen berdasarkan Perbup IKU Nomor 30 Tahun 2016 mencakup dua variabel yaitu angka Indeks Kualitas Udara dan angka Indeks Kualitas Air (tidak menggunakan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dikarenakan Urusan Kehutanan menjadi urusan pemerintah Provinsi).

Formulasi penghitungan capaian kinerja sebagai berikut : (Angka Indeks Kualitas Air + Angka Indeks Kualitas Udara)/2

Capaian IKLH Kabupaten Kebumen tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel : 3.4

IKLH Kabupaten Kebumen Tahun 2020

Indikator Sasaran	Realisasi 2019	2020			Target Akhir RPJ-MD (2021)	% Capaian trhd Target Akhir RPJ-MD
		Tar-get	Realisasi	Capai-an Kinerja		
IKLH	75,89	76	74,22	97,66	77,5	95,77

Perhitungan : (Angka Indeks Kualitas Air 57,69 dan Angka Indeks Kualitas Udara 90,75)/2 = 148,44/2 = IKLH 74,22.

Adapun capaian IKLH tahun 2020 dengan menggunakan 3 variabel berdasarkan standar perhitungan IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai berikut:

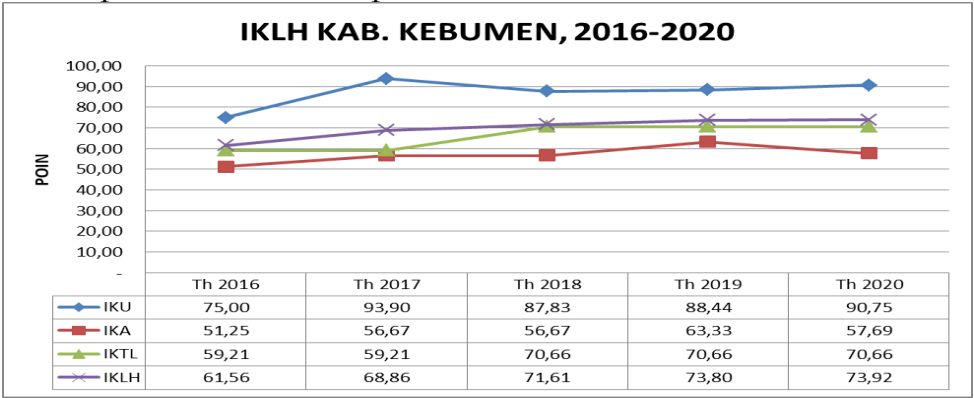
Tabel : 3.5
 Capaian IKLH Tahun 2020 dengan tiga variabel

Variabel	Indeks X		Hasil
Indeks Kualitas Air	57,69	0,376	21,69
Indeks Kualitas Udara	90,75	0,405	36,75
Indek Tutupan Lahan	70,66	0,219	15,48
IKLH			73,92

Predikat IKLH: • < 40 = *waspada* • 40-50 = *sangat kurang baik* • 50-60 = *kurang baik* • 60-70 = *cukup baik* • 70-80 = *baik* • > 80 = *sangat baik*

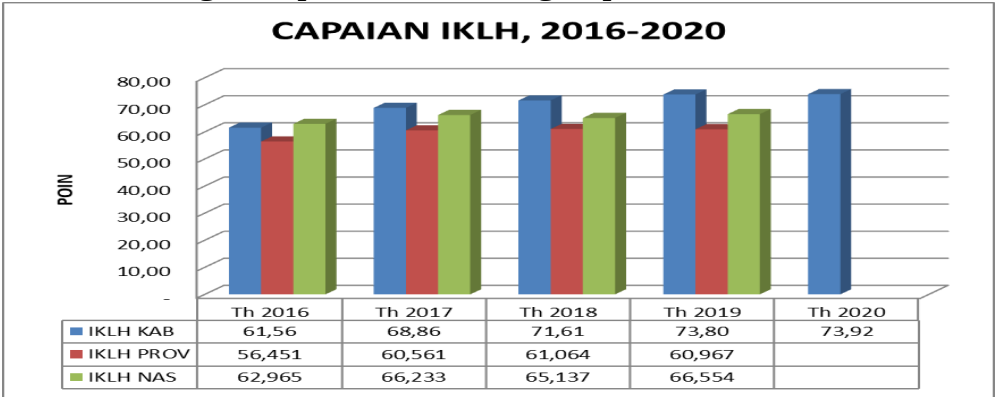
Hasil capaian IKLH selama 5 tahun terakhir kami sajikan pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.2
 Capaian IKLH Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020



Sedangkan Perbandingan capaian kinerja dengan IKLH Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.3
 Perbandingan capaian IKLH dengan provinsi dan nasional



Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, Capaian IKLH Kabupaten Kebumen selalu di atas / lebih besar dari pada

capaian IKLH Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan dibandingkan dengan capaian IKLH secara Nasional, pada tahun 2016 angkanya lebih rendah, tetapi pada tahun 2017 sampai tahun 2019 nilai capaian IKLH Kabupaten Kebumen lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.

Pada tahun 2020, nilai capaian IKLH Kabupaten Kebumen sebesar 73,92, atau masuk kategori “BAIK”.

Upaya/ peran nyata Kabupaten Kebumen dalam mencapai target pada tahun 2020 antara lain melalui kegiatan :

- sosialisasi yang dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan terhadap masyarakat, perihal pengendalian pencemaran lingkungan serta program konservasi sumberdaya alam. Hal ini sedikit dapat merubah pola pikir masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan yang lebih baik
- adanya demplot / percontohan instalasi pengolahan air limbah, terutama air limbah pada kegiatan industri kecil yang merupakan “model” pengolahan sederhana, yang bisa cukup efektif mengurangi beban pencemaran
- upaya penegakan hukum maupun pengawasan terhadap jenis usaha / kegiatan, untuk selalu melaksanakan penetapan terhadap baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan, yang merupakan syarat bisa dikeluarkannya izin PPLH

Keberhasilan pencapaian target bukan berarti tidak ada hambatan atau Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai target IKLH antara lain :

- adanya penambahan penduduk yang cukup tinggi yang berakibat pada bertambahnya volume sampah maupun limbah, sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup
- perilaku sebagian masyarakat yang masih membuang limbah dan sampah secara sembarangan
- keterbatasan anggaran (adanya rasionalisasi anggaran)

Solusi atau upaya untuk mencapai target akhir RPJMD adalah :

- sosialisasi secara terus menerus dan terpadu dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kebumen
- penerapan teknologi yang murah dan mudah untuk pengolahan air limbah
- melakukan konservasi lahan secara massif, melalui gerakan “sak uwong selawe wit sak lawase urip”
- mendorong dan memfasilitasi pembentukan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.
- melakukan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan
- melaksanakan penegakan hukum lingkungan

Upaya yang dilakukan pada tahun 2021 sebagai berikut :

- sosialisasi secara terus menerus dan terpadu dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kebumen
- penerapan teknologi yang murah dan mudah untuk pengolahan air limbah
- melakukan konservasi lahan secara massif, melalui gerakan “sak uwong selawe wit sak lawase urip”
- mendorong dan memfasilitasi pembentukan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.
- melakukan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan
- melaksanakan penegakan hukum lingkungan

Pada tahun 2020 indikator ini didukung oleh Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, program rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup, program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan program peningkatan pengendalian polusi, dengan total anggaran sebesar Rp.

3.312.709.000 dan realisasi Rp. 3.206.044.221,- (96,78%). Seluruh target kinerja program/kegiatan dapat direalisasikan 100%, sedangkan efisiensi anggaran sebesar 3,22% merupakan penghematan belanja barang dan jasa.

Indikator : Capaian luas RTH perkotaan.

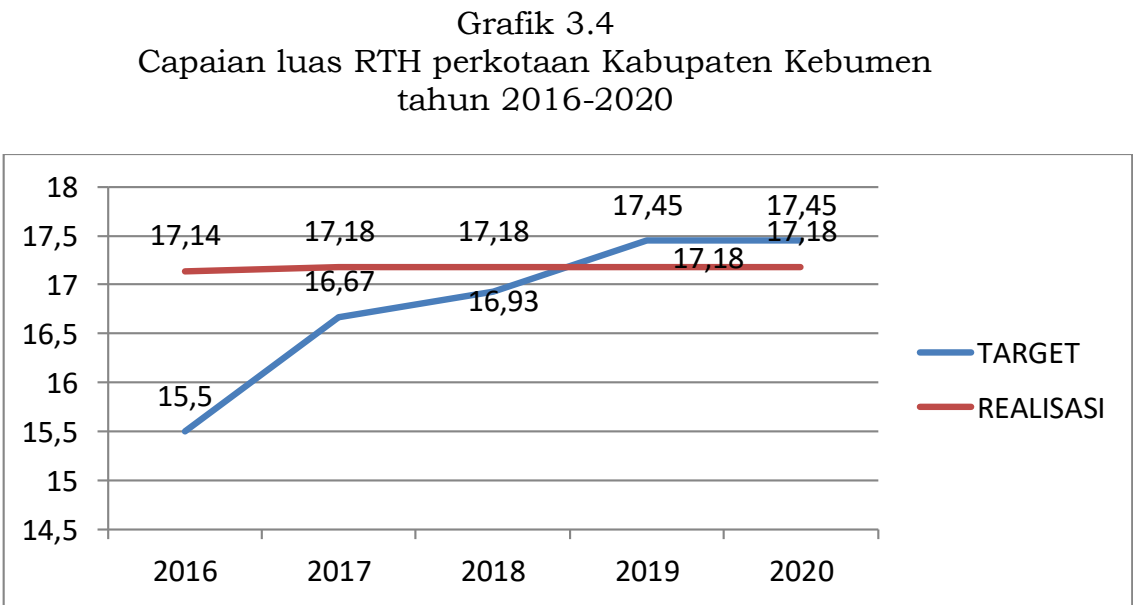
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditetapkan luas RTH minimal yang harus disediakan oleh suatu kota adalah sebesar 30% dari luas wilayah terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Private.

Formulasi penghitungan capaian kinerja sebagai berikut : $\frac{\text{Luas RTH perkotaan}}{\text{Luas kebutuhan RTH perkotaan}} \times 100\%$

Capaian kinerja Luas RTH Perkotaan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6 Capaian luas RTH perkotaan tahun 2020						
No.	Indikator kinerja	capaian sd 2019	2020			Target akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	Capaian luas RTH Perkotaan	17,18	17,45	17,18	98,45	17,45

Sedangkan capaian luas RTH perkotaan lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut :



Data existing RTH perkotaan Kabupaten Kebumen sampai dengan

tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel : 3.7
Data luas RTH Perkotaan sampai dengan tahun 2020

NO	WILAYAH	LUAS KAWASAN PERKOTAAN/ HPL (Ha)	RTH_EKSTENSIF	LUAS (Ha)	CAPAI -AN (%)
1	Gombong	1785,81	Lapangan Makam Sempadan KA Sempadan Sungai	3,13 19,57 21,42 180,77	
				224,89	12,59
2	Karanganyar	483,32	Lapangan Makam Sempadan KA Sempadan Sungai	3,08 9,12 7,17 61,40	
3	Kebumen	1234,38	Alun-Alun Batas Kota Hutan Kota Lapangan Islam Center Makam Median Jalan Pasar Hewan Pulau Jalan Sempadan KA Sempadan Saluran Induk Sempadan Sungai Stadion Taman Taman Jalan Taman Parkir	80,77 3,93 0,41 3,32 0,17 46,43 1,40 0,10 0,14 18,21 14,70 179,56 3,77 5,57 2,35 1,29	16,71
				281,35	22,79
4	Kutowinangun	455,33	Lapangan Makam Sempadan KA Sempadan Sungai	3,56 15,89 3,54 77,68	
				100,6	22,11

NO	WILAYAH	LUAS KAWAS-AN PERKO-TAAN/HPL (Ha)	RTH_EKSIS-TING	LUAS (Ha)	CAPAI-AN (%)
4	Prembun	300,78	Lapangan Makam Taman Sempadan KA Sempadan Su- ngai	7 0,48 9,10 0,82 2,54 31,37	
				44,31	14,73
	TOTAL	4.259,62		731,9 9	17,18

Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 tidak terdapat penambahan luasan RTH perkotaan, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan masih prioritaskan untuk peningkatan maupun untuk pemeliharaan RTH yang sudah ada di wilayah perkotaan (Kebumen, Prembun, Karanganyar, Kutowinangun dan Gombong). Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain terkait dengan kesulitan penambahan lahan RTH di wilayah perkotaan maupun kebutuhan anggaran yang relatif besar. Pada tahun anggaran 2020 anggaran untuk pembangunan RTH dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target akhir RPJMD, diupayakan dengan merencanakan penambahan luasan RTH, di samping tetap melakukan pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTH yang ada.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2020 untuk mendukung indicator ini yaitu Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Program Pengelolaan Areal Pemakaman dengan total anggaran sebesar Rp.2.407.538.000,- dan realisasi Rp. 2.052.742.831 (85,26%). Penghematan sebesar 14,74% berasal dari efisiensi belanja pengadaan barang/jasa.

Indikator : Angka indeks kualitas udara.

Angka Indeks Kualitas Udara dipergunakan untuk menjelaskan/ menginformasikan perubahan-perubahan kualitas udara suatu perkotaan. Formulasi penghitungan indeks kualitas udara berdasarkan kualitas udara ambien di wilayah permukiman, kawasan industri, dan padat lalu lintas yang diwakili oleh 2 (dua) parameter, yaitu parameter SO₂ dan NO₂, dengan formulasi sebagai berikut :

$$IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$$

dimana:
IPU = Indeks Pencemaran Udara
IP_{NO2} = Indeks Pencemar NO2
IP_{SO2} = Indeks Pencemar SO2

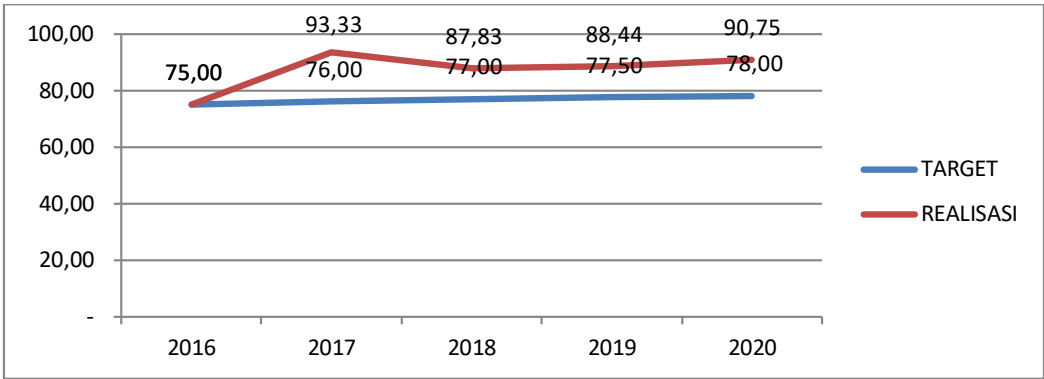
Capaian kinerja Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8
Indeks Kualitas Udara tahun 2020

No.	Indikator kinerja	Satuan	capaian sd 2019	2020			Target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Kualitas Udara	Point/ indeks	88,44	78,00	90,75	116,35	79,00

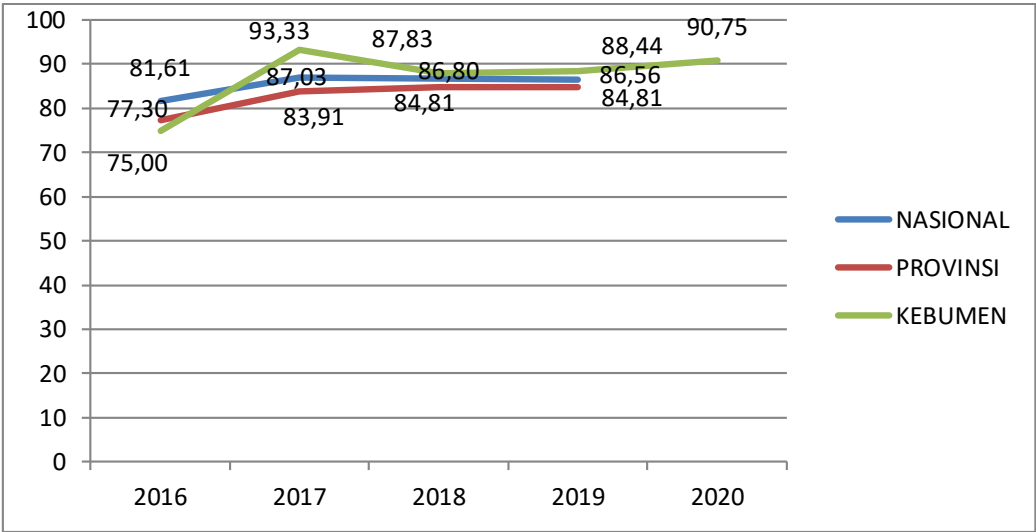
Angka indek tersebut menunjukkan tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek negative bagi kesehatan manusia atau hewan tetapi dapat berpengaruh terhadap lingkungan yang sensitive dan nilai estetika.

Grafik 3.5
Capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020



Perbandingan capaian Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen beberapa tahun terakhir dengan capaian nasional maupun provinsi Jawa Tengah, sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.6
 Perbandingan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kebumen dengan provinsi dan nasional



IKU provinsi dan nasional tahun 2020 belum dapat disandingkan.

Pada tahun anggaran 2020 program yang dilaksanakan untuk mendukung indikator ini yaitu program peningkatan kualitas dan akses informasi lingkungan hidup dengan anggaran sebesar Rp.196.047.000,- dan realisasi Rp. 156.009.754 (79,58%). Penghematan penggunaan anggaran sebesar 20,42% berasal dari efisiensi belanja pengadaan barang/jasa.

Indikator : Angka indeks kualitas air.

Indeks kualitas air sungai dihitung dengan menggunakan parameter *Total Suspended Solid (TSS)*, *Dissolved Oxygen (DO)*, *Biochemical Oxygen Demand (BOD)*, *Chemical Oxygen Demand (COD)*, Total Fosfat, Total Coli dan Fecal Coli. Untuk parameter Fecal Coliform dan Total Coliform tidak dimasukkan dikarenakan belum dilakukan pengukuran. Sungai yang rutin diukur meliputi sungai lukulo dan wawar, di lokasi hulu dan hilir selama musim kemarau dan penghujan.

Keberadaan air terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin

menurun. Kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Perhitungan indikator kualitas air sungai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Formulasi penghitungan angka Indeks Kualitas Air dengan formulasi sebagai berikut :

$$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$$

dimana:
 (Ci/Lij)M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij
 (Ci/Lij)R adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij

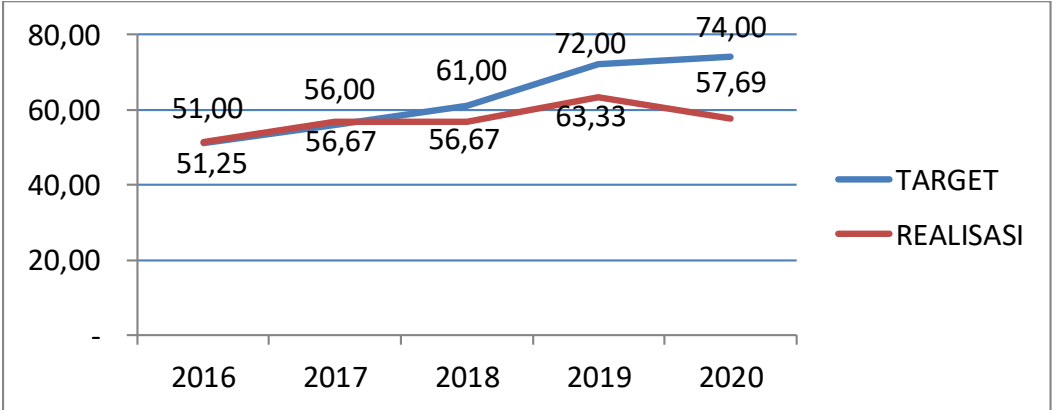
Indeks kualitas air tahun Kabupaten Kebumen tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel : 3.9
 Capaian indeks kualitas air tahun 2020

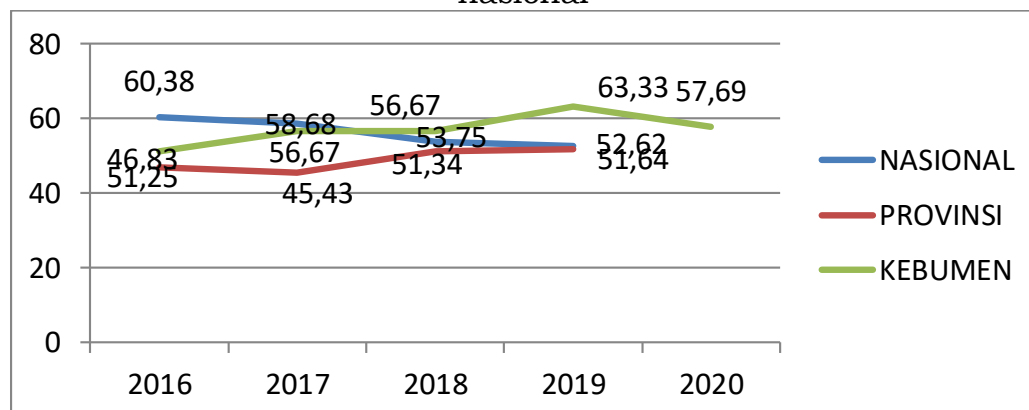
No.	Indikator kinerja	Satuan	capaian sd 2019	2020			Target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	Indeks Kualitas Air	Point/ indeks	63,33	74,00	57,69	77,96	76,00

Berdasarkan hasil pemantauan dan pengujian yang dilakukan secara berkala terhadap kualitas air sungai di Kabupaten Kebumen diketahui bahwa beberapa parameter di atas baku mutu. Capaian indeks kualitas air Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.7
 Capaian Indeks Kualitas Air Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020



Grafik : 3.8
Capaian IKA Kabupaten Kebumen dibandingkan provinsi dan nasional



Capaian IKA tahun 2020 provinsi dan nasional belum dapat disandingkan.

Capaian Indeks Kualitas Air tahun 2020 tidak sesuai dengan target, hal tersebut terutama disebabkan masih terjadi pencemaran air disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut menjaga kualitas air sungai, diindikasikan dengan masih tercemarnya air sungai dari limbah domestik, adanya budaya buang air besar sembarangan dan adanya pembuangan limbah industri kecil.

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan bantuan fasilitas sarana prasarana instalasi pengolahan air limbah industri, pelayanan pengelolaan air limbah domestic (sedot tinja), dan sosialisasi serta penyuluhan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung indikator ini yaitu program pengendalian polusi dengan anggaran Rp.431.454.000,0 dan realisasi Rp. 425.376.200,- (98,59). Penghematan penggunaan anggaran sebesar 1,41%) berasal efisiensi belanja pengadaan barang/jasa.

Indikator : Cakupan pelayanan sampah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi

pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

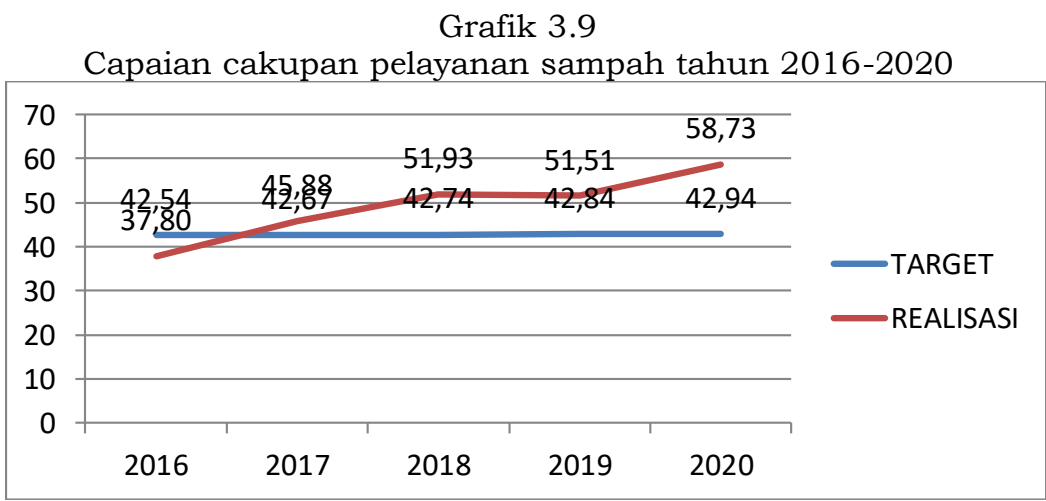
Formulasi penghitungan cakupan pelayanan sampah yaitu :
Jumlah sampah yang tertangani/Jumlah produksi sampah x
100%

Capaian Cakupan Pelayanan Sampah tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.10
Capaian cakupan pelayanan sampah tahun 2020

No.	Indikator kinerja	Satuan	capaian sd 2019	2020			Target akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	Cakupan Pelayanan Sampah	%	51,51	42,94	58,73	136,77	42,94

Capaian cakupan pelayanan sampah tahun 2016-2020 sebagaimana grafik berikut :



Tabel : 3.11
Perhitungan cakupan pelayanan sampah tahun 2020

No	Kecamatan	Jml Desa/kel	Timbulan Sampah dihasilkan (M3/hr)	Timbulan Sampah terangkut (m3.hr)	(%)
1	Ayah	18	125,07	-	
2	Buayan	20	122,41	-	
3	Puring	23	119,33	-	
4	Petanahan	21	120,04	-	

No	Kecamatan	Jml Desa/kel	Timbulan Sampah dihasilkan (M3/hr)	Timbulan Sampah terangkut (m3.hr)	(%)
5	Klirong	24	122,71	-	
6	Buluspesantren	21	118,60	-	
7	Ambal	32	123,71	-	
8	Mirit	22	99,26	-	
9	Bonorowo	11	41,86	-	
10	Prembun	13	59,47	12,00	0,20
11	Padureso	9	30,09	-	
12	Kutowinangun	19	95,26	36,00	0,38
13	Alian	16	122,09	-	
14	Poncowarno	11	33,69	-	
15	Kebumen	24	274,41	186,00	0,68
16	Pejagoan	13	109,89	36,00	0,33
17	Sruweng	21	120,74	-	
18	Adimulyo	23	77,18	-	
19	Kuwarasan	22	100,49	-	
20	Rowokele	11	95,60	-	
21	Sempor	16	133,72	-	
22	Gombang	12	106,97	84,00	0,79
23	Karanganyar	7	76,90	54,00	0,70
24	Karanggayam	19	109,41	-	
25	Sadang	7	40,97	-	
26	Karangsambung	14	85,50	-	
	Kota Terlayani	74	633,42	372,00	58,73

Dari data tersebut di atas, bahwa capaian kinerja cakupan pelayanan sampah dapat tercapai sesuai dengan target, hal tersebut ditunjang dengan adanya penambahan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terutama penambahan armada angkutan sampah dan peningkatan fasilitas TPA Kaligending dan TPA Semali.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja cakupan pelayanan sampah terutama produksi sampah semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, di samping kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan sampah rumah tangga

Upaya yang dilakukan di samping dengan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, juga dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan (pemberdayaan bank sampah di

tingkat desa/kelurahan, mengoptimalkan fungsi TPS3R, dan pengolahan sampah rumah tangga).

Program untuk mendukung indikator ini yaitu program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan anggaran Rp. 8.091.653.000,- dan realisasi Rp. 7.861.449.177,- (97,15%). Dalam hal ini terdapat penghematan penggunaan anggaran sebesar 2,85%, berasal dari efisiensi belanja barang/jasa.

3.1.3. Sasaran 3 : “Meningkatnya keberdayaan masyarakat”.

Sasaran ke-3 dengan indikator sasaran : Cakupan rumah layak huni. Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan pemukiman kumuh. Berdasarkan Database Perumahan Kabupaten Kebumen yang disusun tahun 2014 sebagai data dasar penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kebumen, jumlah rumah di Kabupaten Kebumen sebanyak 306.885 unit dengan jumlah RTLH sebanyak 26.860 unit, dimana pada RPJMD Tahun 2016-2021 ditargetkan akan dituntaskan pada tahun 2021.

Formulasi penghitungan cakupan rumah layak huni : $\text{Jumlah rumah layak huni} / \text{Jumlah seluruh rumah} \times 100\%$

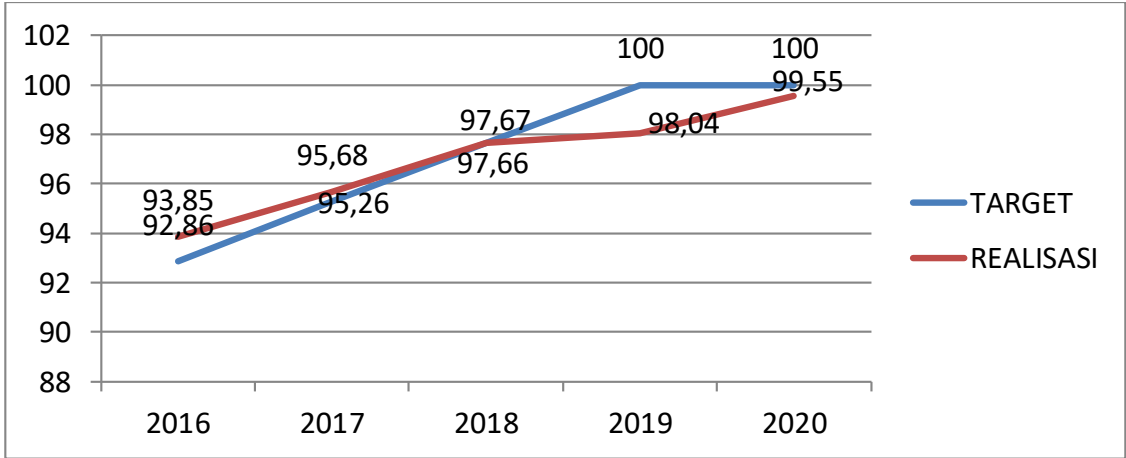
Capaian indicator Cakupan Rumah Layak Huni Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.12							
Capaian cakupan rumah layak huni tahun 2020							
No.	Indikator kinerja	Satuan	Capaian 2019	2020			Target akhir RPJMD
				Tar-get	Realisasi	% Capaian	
1	Cakupan Rumah Layak Huni	%	98,04	100	99,55	99,55	100

Perbandingan capaian kinerja cakupan rumah layak huni tahun 2020

dan tahun sebelumnya, sebagaimana grafik berikut :

Grafik : 3.10
Capaian Cakupan Rumah Layak Huni tahun 2016-2020



Sampai dengan akhir tahun 2020, dari RTLH sejumlah 26.860 unit sudah tertangani sejumlah 25.481 unit, sehingga masih tersisa 1.379 unit yang harus diselesaikan pada tahun 2021 melalui PBD Kabupaten sejumlah 600 unit, dan dari sumber dana lainnya (DAK, APBD Provinsi dan APBDes) sejumlah 779 unit.

Penanganan RTLH tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.13
Alokasi anggaran penanganan RTLH Tahun 2020

No.	Sumber dana	Jumlah
1	APBN (BSPS)	750 unit
2	APBD Prov	613 unit
3	DAK Murni	117 unit
4	DAK Silpa	27 unit
5	APBD Kab (P2MKM)	852 unit
6	Korban Bencana	9 unit
7	Ruspin	20 unit
8	APBDes	2245 unit
	Jumlah	4633 unit

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penanganan RTLH terutama terkait dengan pembiayaan, dimana anggaran yang disalurkan oleh pemerintah merupakan dana stimulan, sehingga sangat diperlukan dukungan berupa swadaya masyarakat. Pada tahun anggaran 2020 terdapat refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Upaya yang dilakukan dengan mengupayakan dukungan anggaran untuk penanganan RTLH dari berbagai sumber, di samping dari APBD Kabupaten, juga APBD Provinsi, APBN, DAK, APBDes maupun sumber pendanaan lainnya.

Tidak terserapnya alokasi anggaran yang telah disediakan, terutama disebabkan adanya calon penerima bantuan yang tidak siap melaksanakan maupun mengundurkan diri.

3.2. Realisasi Anggaran

Dari total anggaran tahun 2020 sebesar Rp.20.428.167.000,- Realisasi sebesar Rp.19.283.104.318,- (94,39%). Anggaran tersebut untuk melaksanakan 14 program dalam rangka menunjang pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran berdasarkan program sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.14
Realisasi anggaran belanja tahun anggaran 2020

No.	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.513.944.000	9.067.245.600	95,30	100
1	Non Program/Kegiatan (Gaji dan Tunjangan PNS)	9.513.944.000	9.067.245.600	95,30	100
II.	BELANJA LANGSUNG	10.914.223.000	10.215.858.718	93,60	100
1	Program Pengembangan Perumahan	736.934.000	734.699.818	99,70	100
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	641.337.000	623.128.264	97,16	100
3	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	1.895.142.000	1.824.691.345	96,28	100
4	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1.788.758.000	1.740.985.659	97,33	100

No.	Program /	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Reali
5	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	126.279.000	124.830.490	98,85	100
6	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	770.171.000	758.842.118	98,53	100
7	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	196.047.000	156.009.754	79,58	100
8	Program peningkatan pengendalian polusi	431.454.000	419.985.200	97,34	100
9	Program pengelolaan areal pemakaman	322.875.000	295.576.267	91,55	100
10	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	2.084.663.000	1.757.166.564	84,29	100
11	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	181.286.000	180.322.886	99,47	100
12	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.376.530.000	1.249.278.053	90,76	100
13	Program peningkatan sarana dan praasarana aparatur	300.237.000	288.971.300	96,25	100
14	Program pengembangan data/informasi	62.510.000	61.371.000	98,18	100
	TOTAL	20.428.167.000	19.283.104.318	94,39	100

Terdapat silpa sebesar Rp. 1.145.062.682,- (5,61%) berasal dari penghematan belanja gaji PNS dan penghematan belanja barang/jasa serta sisa tender.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja utama, menunjukkan bahwa belum semua indikator kinerja dapat tercapai sesuai dengan target, dimana 2 (dua) indikator dapat tercapai, sedangkan 5 (lima) indikator belum dapat tercapai sesuai dengan target. Nilai capaian indikator untuk masing-masing sasaran sebagai berikut :

4.1.1. Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah.

Indikator : Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan.

Indikator ini belum dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 83,33% baru dicapai 48,78% (% capaian 58,54 atau kategori “Cukup”).

4.1.2. Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

Indikator 1 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Indikator ini sudah dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 76 realisasi 74,22 (% capaian 97,66% atau kategori “Baik Sekali”).

Indikator 2 : Capaian Luas RTH Perkotaan.

Indikator ini belum dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 17,45% realisasi 17,18 (% capaian 98,45% atau kategori “Baik”).

Indikator 3 : Indeks Kualitas Udara.

Indikator ini dapat tercapai sesuai dengan target, dari target 78 realisasi 90,75% (% capaian 116,35% atau kategori “Baik Sekali”).

Indikator 4 : Indeks Kualitas Air.

Indikator ini belum dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 74 realisasi 57,69 (% capaian 77,96% atau kategori “Baik”).

Indikator 5 : Cakupan Pelayanan Sampah.

Indikator ini dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 42,94% realisasi 58,73 (% capaian 136,77% atau kategori “Baik Sekali”).

4.1.3. Sasaran 3 : Meningkatnya keberdayaan masyarakat.

Indikator : Cakupan Rumah Layak Huni.

Indikator ini belum dapat dicapai sesuai dengan target, dari target 100% realisasi 99,55% (% capaian 99,55% atau kategori “Baik”).

4.2. Permasalahan/kendala.

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain :

- Anggaran untuk penanganan kawasan permukiman kumuh meliputi beberapa kewenangan yaitu kewenangan kabupaten, provinsi dan pusat, sampai saat ini alokasi anggaran untuk masing-masing kewenangan belum sesuai dengan yang direncanakan.
- Untuk penambahan luasan ruang terbuka hijau (RTH) terkendala dengan sulitnya pengadaan lahan untuk pembangunan RTH di wilayah perkotaan.
- Masih terjadinya pencemaran lingkungan terutama pencemaran air dari limbah domestik.
- Sedangkan untuk pencapaian target cakupan rumah layak huni terkendala dengan ketersediaan anggaran.

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja.

Dalam rangka peningkatan dan pencapaian target kinerja pada tahun yang akan datang, beberapa strategi dan kebijakan yang akan ditempuh antara lain :

- Untuk penanganan kawasan kumuh diupayakan dengan meningkatkan alokasi anggaran melalui usulan kepada instansi di tingkat provinsi maupun pusat, sedangkan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten diprioritaskan untuk penanganan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten.

- Dalam rangka pencapaian target kinerja Untuk pencapaian luasan RTH, diupayakan dengan merencanakan penambahan luasan sesuai dengan kondisi anggaran maupun meningkatkan kualitas RTH yang sudah ada.
- Untuk pencapaian target indeks kualitas air antara lain dengan memberikan bantuan fasilitas sarana prasarana instalasi pengolahan air limbah industri, pelayanan pengelolaan air limbah domestic (sedot tinja), dan sosialisasi serta penyuluhan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.
- Sedangkan untuk pencapaian cakupan rumah layak huni sudah direncanakan penyelesaiannya pada tahun 2021.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEBUMEN**

H. EDI Rianto, ST, MT

Pembina Tk. I

NIP. 19701101 199803 1 006

Paraf/tanda tangan

- | | |
|----------------|---|
| 1. Sekdin | : |
| 2. Kabid PKP | : |
| 3. Kabid PPKL | : |
| 4. Kabid PPKLH | : |
| 5. Kabid KP | : |

LAMPIRAN

REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.513.944.000	9.067.245.600	95,30	100
1	Non Program/Kegiatan (Gaji dan Tunjangan PNS)	9.513.944.000	9.067.245.600	95,30	100
II.	BELANJA LANGSUNG	10.914.223.000	10.215.858.718	93,60	100
1	Program Pengembangan Perumahan	736.934.000	734.699.818	99,70	100
	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	736.934.000	734.699.818	99,70	100
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	641.337.000	623.128.264	97,16	100
	Penanganan kawasan kumuh perkotaan	641.337.000	623.128.264	97,16	100
3	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	1.895.142.000	1.824.691.345	96,28	100
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	382.960.000	369.600.500	96,51	100
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	1.149.000.000	1.111.900.993	96,77	100
	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	101.713.000	88.773.677	87,28	100
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	261.469.000	254.416.175	97,30	100
4	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1.788.758.000	1.740.985.659	97,33	100
	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	100.886.000	96.855.950	96,01	100
	Pemantauan Kualitas Lingkungan	907.132.000	876.678.012	96,64	100
	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	68.471.000	68.170.368	99,56	100
	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	52.757.000	50.525.339	95,77	100
	Pengkajian dampak lingkungan	230.977.000	229.488.827	99,36	100
	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	91.427.000	90.371.325	98,85	100
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	60.108.000	59.786.087	99,46	100
	Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan	127.000.000	122.280.000	96,28	100
	Penerapan manajemen lingkungan limbah industri tembakau yang mengacu AMDAL (DBHCHT)	150.000.000	146.829.751	97,89	100
5	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	126.279.000	124.830.490	98,85	100
	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	126.279.000	124.830.490	98,85	100
6	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	770.171.000	758.842.118	98,53	100
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	770.171.000	758.842.118	98,53	100
7	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	196.047.000	156.009.754	79,58	100
	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	43.694.000	43.213.154	98,90	100
	Pengembangan data dan informasi lingkungan	59.255.000	58.810.100	99,25	100
	Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	93.098.000	53.986.500	57,99	100
8	Program peningkatan pengendalian polusi	431.454.000	419.985.200	97,34	100
	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	31.454.000	25.376.200	80,68	100
	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	400.000.000	394.609.000	98,65	100
9	Program pengelolaan areal pemakaman	322.875.000	295.576.267	91,55	100

No.	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	42.020.000	39.664.000	94,39	100
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	280.855.000	255.912.267	91,12	100
10	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	2.084.663.000	1.757.166.564	84,29	100
	Penyusunan program pengembangan RTH	142.687.000	138.575.100	97,12	100
	Pemeliharaan RTH	1.941.976.000	1.618.591.464	83,35	100
11	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	181.286.000	180.322.886	99,47	100
	Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah	181.286.000	180.322.886	99,47	100
12	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.376.530.000	1.249.278.053	90,76	100
	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	4.998.000	99,96	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	242.312.000	167.739.183	69,22	100
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	117.716.000	116.565.475	99,02	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	141.530.000	133.136.750	94,07	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	63.800.000	63.799.500	100,00	100
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25.000.000	25.000.000	100,00	100
	Penyediaan alat tulis kantor	45.000.000	44.235.550	98,30	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	44.500.000	44.388.975	99,75	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.000.000	11.974.750	99,79	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.000.000	8.886.000	74,05	100
	Penyediaan makanan dan minuman	51.600.000	48.119.500	93,25	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	33.311.000	33.049.295	99,21	100
	Penunjang Administrasi Perkantoran	552.072.000	516.770.075	93,61	100
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	30.689.000	30.615.000	99,76	100
13	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	300.237.000	288.971.300	96,25	100
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	54.710.000	49.770.000	90,97	100
	Pengadaan peralatan gedung kantor	68.242.000	65.040.000	95,31	100
	Pengadaan mebeleur	40.157.000	38.445.000	95,74	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	12.369.000	11.364.300	91,88	100
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	114.759.000	114.354.000	99,65	100
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10.000.000	9.998.000	99,98	100
14	Program pengembangan data/informasi	62.510.000	61.371.000	98,18	100
	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	62.510.000	61.371.000	98,18	100
	TOTAL	20.428.167.000	19.283.104.318	94,39	100